

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintahan dan bagiannya di Indonesia dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada masyarakat untuk mewujudkan *good governance*. *Good governance* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Proses akuntansi yang digunakan mengadopsi akuntansi akrual. Akuntansi akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui efek transaksi dan kejadian lainnya pada saat terjadi, tanpa mempertimbangkan waktu dan penerimaan atau pembayaran kas atau setara kas. Proses akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak dan dapat untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan masing-masing. Akuntansi sektor publik digunakan oleh pemerintah Indonesia termasuk Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan ada dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bertujuan untuk meningkatkan *good governance* serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini harus mampu

menciptakan birokrasi yang semakin unggul, transparan, dan efisien. Regulasi terhadap Administrasi Pemerintahan merupakan usaha untuk membangun prinsip-prinsip demokratis, objektif, dan profesional yang membentuk sikap, perilaku, dan budaya administrasi yang adil dan memberikan kepastian hukum serta sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat (Undang-Undang (UU) No. 30 tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). *Good governance* memiliki beberapa prinsip di antaranya meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang disediakan bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan tersebut dengan menyajikan informasi yang memungkinkan perbandingan antara kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, mengevaluasi kondisi keuangan dan hasil operasi, menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, serta membantu dalam penilaian efisiensi dan efektivitas. Laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan seperti laporan arus kas, neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Kawatu, 2019).

Meningkatkan kinerja keuangan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pemerintahan, terutama dalam pengambilan keputusan untuk

masa yang akan datang. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan pemerintah daerah atas berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mematuhi aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar. Analisis kinerja keuangan membantu dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana publik dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan (Fahmi, 2018).

Informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat digunakan untuk meramalkan sumber daya ekonomi yang diterima untuk menggambarkan kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian yang terkait dengan sumber daya ekonomi tersebut. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga memberikan informasi mengenai profitabilitas, keekonomian, dan efektivitas apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun tidak. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan gambaran tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta membandingkan anggaran dengan realisasinya selama periode tertentu (Hartoto dkk, 2023).

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai pembangunan perekonomian dan khususnya dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Dinas Perdagangan, Koperasi, 2021). Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan maka diperlukan analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

| Tahun | Anggaran | | Realisasi | |
|--------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 2019 | Rp | 5.858.023.941 | Rp | 5.858.748.134 |
| 2020 | Rp | 5.684.865.300 | Rp | 8.517.332.900 |
| 2021 | Rp | 6.578.140.000 | Rp | 6.946.131.617 |
| 2022 | Rp | 7.265.000.500 | Rp | 7.361.554.479 |
| 2023 | Rp | 8.818.480.500 | Rp | 8.620.621.200 |

Sumber: Data Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 (2024)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, terdapat peningkatan yang signifikan pada realisasi anggaran tahun 2019-2020 dengan target yang telah ditentukan berhasil tercapai. Namun, pada tahun 2021-2023 terjadinya penurunan realisasi anggaran akibat tidak tercapainya target. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kios di pasar yang tutup atau tidak digunakan untuk berjualan karena sarana prasarana yang rusak, serta perencanaan yang belum optimal yang mengakibatkan keterlambatan akibat prosedur yang terlalu panjang, di samping itu adanya serapan anggaran belanja yang besar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka diteliti dan dianalisis lebih jauh tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan. Karena data yang diperoleh dari

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal lebih sesuai untuk dianalisis menggunakan rasio tersebut, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh lebih akurat dan informatif. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana kinerja keuangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal tahun 2019-2023 ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran menggunakan metode Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditarik tujuan penelitian pada penelitian ini adalah “Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal tahun 2019-2023 ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran menggunakan metode Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai kinerja keuangan ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

2. Bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi serta bahan masukan yang dapat dipertimbangkan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Menambah jalinan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antara Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dengan Politeknik Harapan Bersama khususnya Program Studi D-III Akuntansi dan dapat dijadikan salah satu referensi atau pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya.

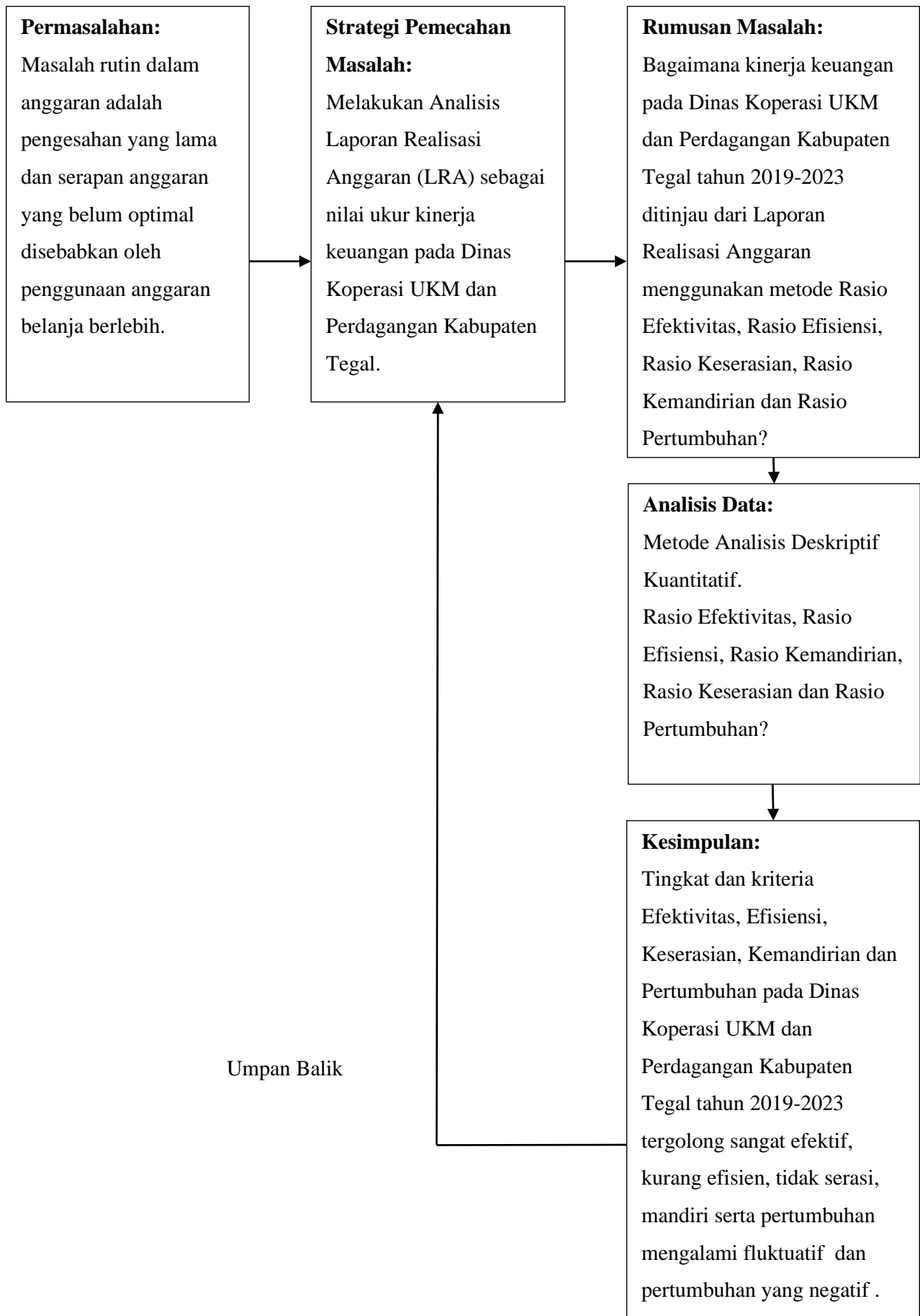
1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah membahas tentang Kinerja Keuangan ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019-2023 menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Kecerahan dan Rasio Pertumbuhan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

1.6 Kerangka Berpikir

Kinerja keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengendalikan seluruh aset yang dimilikinya. Pada intinya, kinerja keuangan merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana suatu dinas dalam menjalankan kegiatannya dengan efektif, serta untuk mengidentifikasi di mana peningkatan dapat dilakukan guna memperbaiki efisiensi dan produktivitas. dalam mengelola keuangan, pemahaman akan pentingnya evaluasi kinerja keuangan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu yang digunakan dalam evaluasi ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dikatakan baik apabila di dalam penyerapan dan anggarannya efektif dan optimal. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan, anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk menilai kinerja keuangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul yang di dalamnya berisi judul tugas akhir, logo, tugas akhir, nama mahasiswa, NIM, nama program studi dan tahun, kemudian ada halaman pengesahan lalu daftar isi untuk memberikan gambaran secara lebih rinci dari sistematika penelitian tugas akhir dengan ditunjukkan nomor halamannya.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yaitu teori-teori tentang pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Kinerja Keuangan dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian secara singkat, hasil penelitian memuat hasil analisis data serta pembahasan yang menjelaskan tentang hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdapat rangkuman yang mencakup garis besar kesimpulan yang diambil dari inti penelitian, serta saran mencakup garis besar tindakan yang perlu diambil untuk ditindaklanjuti.

3. Bagian akhir

Bagian terakhir dari tugas akhir berisi daftar pustaka yang mencakup semua referensi yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir, dengan menggunakan format APA (*American Psychological Association*) dan lampiran yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kelengkapan laporan Tugas Akhir.